

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dituangkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Sebelum dibentuknya program KAMP Dusun Sawangan memiliki riwayat praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam praktiknya politik uang yang terjadi di Dusun Sawangan beragam bentuknya. Bentuk praktik politik uang yang terjadi yaitu melalui pemberian uang (*vote buying*), pemberian barang-barang kelompok (*club goods*) dan poyek-proyek gentong baik (*pork barrel projects*). Praktik politik uang yang dilakukan di Dusun Sawangan lebih mengarah pada kepentingan kelompok daripada kepentingan individu karena dinilai lebih efektif dalam mendapat dukungan masyarakat.

Implementasi program KAMP di Dusun Sawangan Kabupaten Magelang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai upaya untuk mengurangi adanya praktik politik uang. Bawaslu Kabupaten Magelang dibantu oleh Pemerintah Desa Sawangan, Pemerintah Dusun Sawangan dan Masyarakat Dusun Sawangan membentuk program KAMP untuk mempersiapkan Pemilu tahun 2019 yang bersih dari politik uang. Hasil Implementasi Program KAMP dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Kasus Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang) yang mengacu pada teori Edward III adalah sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi dalam koordinasi dan sosialisasi oleh Bawaslu mengenai program KAMP berjalan sangat baik. Sosialisasi yang dilakukan disetiap kegiatan kelompok masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang. Masyarakat yang awalnya ragu-ragu kemudian menjadi yakin bahwa politik uang di Dusun Sawangan dalam Pemilu 2019 dapat ditolak, namun pelaku politik masih belum dapat menerima adanya program KAMP.

### 2. Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia dinilai sudah memadai, semua pihak-pihak ikut terlibat dalam memerangi politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sumber daya anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan program masih menggunakan kas pribadi Bawaslu dibantu sumbangan oleh masyarakat karena belum ada anggaran secara khusus terkait program KAMP.

### 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam implementasi program KAMP sangat profesional. Komitmen yang dilakukan dengan baik menciptakan sebuah hubungan yang baik untuk mesukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 terbukti dengan menurunnya kasus pelanggaran politik.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik dan terstruktur, namun dalam pelaksanaan program masih belum ada regulasi yang tegas. Regulasi yang kurang tegas sangat disayangkan karena regulasi merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan sebuah program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program KAMP sudah dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Magelang, meskipun dalam proses implementasinya masih terdapat berbagai kendala akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan baik.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengajukan saran terkait Implementasi Program KAMP dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Kasus Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang) yang kemudian dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk keberlanjutan program KAMP, yaitu:

1. Bawaslu Kabupaten Magelang harus lebih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang dalam Pemilu dapat berkurang melalui program KAMP. Bawaslu juga harus mampu memberi pemahaman kepada para pelaku politik agar mereka juga dapat membantu melaksanakan Pemilu yang bersih dan berintegritas.

2. Bawaslu Kabupaten Magelang harus lebih memperhatikan hal-hal mendasar seperti menyusun regulasi yang tegas sebagai rencana sebuah program.
3. Peneliti berharap koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dapat ditingkatkan lagi menggunakan media informasi yang sudah tersedia. Hal tersebut dilakukan agar proses koordinasi dan sosialisasi dapat menyebar secara luas dengan cepat.